

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Agustinova, Danu Eko. (2015). *Memahami Metode dan Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Calpulis.
- Basrowi dan Suwandi. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indrajit, Richardus Eko. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*.
- Leonidas G, Anthopoulos dan Christopher G. Reddick. (2014). “*Government eStrategic Planning and Management*”, New York: Springer.
- Napitupulu, Darmawan dkk. (2020). *e-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*. Medan: Yayasan Kita Merdeka.
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruz.
- Subyantoro, Arief dan FX Suwanto. (2006). *Metode dan teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

- Habibullah, Achmad. (2010). *Kajian Pemanfaatan dan Pengembangan e-Government*. Jurnal Unair. Vol. 23, No.3

Hernikawati, Dewi. (2013). *Pengelompokkan Implementasi e-Government Tingkat Provinsi dengan Analisis Klaster*. *Jurna; Ilmu Pengetahuan dan teknologi Komunikasi*. Vo. 15, No.1, 2013.

Irawan, Bambang. (2015). *e-Government sebagai Bentuk Baru dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik*. *Jurnal Paradigma*. Vo. 4, No. 3.

Izzati, Berlian Maulidya. (2017). *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Publik e-Government (Government to Citizen) terhadap Penciptaan Public Value (Studi Kasus: Kota Surabaya)*. *TESIS*. Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Jatmiko, Victoryya Maharay. (2019). *Pengaruh Kualitas Website perpusbungkarno.perpusnas.go,id terhadap Kepuasan Pengguna*. *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga*. Vol.9, No.2.

Joesyiana, Kiki. (2018). *Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study pada Mata Kuliah Manajemen Operasional(Survey pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Semester III UIR)*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP*. Vol. 6, No. 2.

Lestari, Yeni Denisa dkk. (2019). *Pengembangan e-Government melalui Aplikasi Aspirasi Masyarakat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang*. *Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)*. Vol. XVI, No. 2.

Liung, Hon. dkk. (2017). *Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan dalam Meningkatkan Loyalitas di Mpperasi Harga*. *Juisi* . Vol.8, No.2.



- Maharani, Devita Dwi dkk. (2020). *Penerapan e-Planning sebagai Bentuk Sistem Perencanaan Daerah Berbasis Teknologi di Kabupaten Demak*. Journal of Politic and Government Studies (JPGS). Vol. 9, No. 3.
- Madekhan. (2018). *Posisi dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif*. Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Vol. 7, No. 2.
- Nugraha, Joko Tri. (2018). *e-Government dan Pelayanan Publik (Studi tentang Elemen Sukses Pengembangan e-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman*. Jurnal Komunikasi dan Kajian Media. Vol. 2, No. 1.
- Ompusunggu, Vina. (2017). *Peranan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa (Studi pada Pembangunan Irigasi di Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu)*. Jurnal Agrica. Vol.10, No.1.
- Purwanto, Agung dan Tony Dwi Susanto. (2018). *Pengaruh Dimensi Kepercayaan terhadap Adopsi Layanan e-Government*. INFORM: Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Vol.3, No.1.
- Putro, Shandy Widjoyo, dkk. (2014). *Pengaruh Kualitas Layanan dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Konsumen Restoran Happy Garden Surabaya*. Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol.2, No.1.
- Supriyanto, Aji. (2015). *Kesiapandan Adopsi e-Government pada Negara Berkembang*. SEMANTIK, Id paper. SM058
- Winarti, dan Lulu Chaerani M, *Pengukuran Kualitas Situs Perguruan Tinggi dari Sudut Pandang Pemakai dengan Menggunakan Meotde WEBQUAL 4.0*. Jurnal Ilmiah Informatika Komputer. Vo. 19, No. 3.

Zainal A, Hasibuan. (2007). *Langkah-langkah Strategis dan Taktis Pengembangan e-Government untuk PEMDA*. Jurnal Sistem Informasi MTI UI. Vol. 3, No. 1.

SKRIPSI/TESIS

Nurussalam, Ahdin. (2015). *Analisis Kemampuan Siswa dalam Mengkomunikasikan Soal Cerita Menjadi Kalimat pada Materi Volume Kubus dan Balok Kelas VIII SMPN 4 Tulungagung*. IAIN Tulungagung.

Rachmawati, Merita Indra dkk. (2018). *Intergovernmental Network dalam perencanaan Pembangunan Berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD): Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur*. Malang: Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah.

Simangunsong, Jumadi. (2010). *Pengembangan e-Government di Indonesia*. Jakarta: Jurusan Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia.

Zakiyah, Darajat. (2019). *Manajemen Program Simpan Pinjam Perempuan oleh Badan Kerjasama Nagari Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*. Padang.

SEMINAR NASIONAL

Retnowati, Nurcahyani Dewi dkk. (2008). *Peranan e-Government dalam Rangka Mewujudkan Good Governance bagi Masyarakat*. Seminar Nasional Informatika (semnasIF). UPN Veteran Yogyakarta

Yunita, Novi Prisma dkk. (2018). *Kondisi Terkini Perkembangan Pelaksanaan e-Government di Indonesia: Analisis Website*. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA), Universitas Islam Indonesia.

SITUS WEB

Agamkab.go.id, “Kabupaten Agam Meraih Peringkat II dalam Penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 Tingkat Provinsi Sumatera Barat”, Diakses dari

<https://www.agamkab.go.id/index.php/Agamkab/detailberita/8180/kabupaten-agam-meraih-peringkat-ii-dalam-penilaian-perencanaan-pembangunan-daerah-ppd-tahun-2018-tingkat-provinsi-sumatera-barat.html> pada 23 Februari 2021

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah. (2017). *e-Government*. Diakses dari <http://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/e-government#:~:text=e%2DGovernment%20dapat%20diaplikasikan%20pada,atau%20proses%20keperintahan%20yang%20demokratis> pada 1 Januari 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *Visi Misi Kabupaten Agam*. Diakses dari <http://bappeda.agamkab.go.id/Profil/Visi-misi> pada 13 Januari 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Kabupaten Tanah Datar dan Kota Payakumbuh Raih Penghargaan Pembangunan Daerah PPD Tahun 2019*. Diakses dari <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/86-kabupaten-tanah-datar->

dan-kota-payakumbuh-raih-penghargaan-pembangunan-daerah-ppd-tahun-2019-tingkat.html pada 3 Januari 2021.

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Planning Sakato Plan* untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021. Diakses dari <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/123-sosialisasi-dan-pelatihan-aplikasi-e-planning-sakato-plan-untuk-penyusunan-dokumen-perencanaan-tahun.html> pada 6 Januari 2021.

Berita Sumbar. (2019). Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-planning Sakato Plan untuk penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2021. Diakses dari <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/123-sosialisasi-dan-pelatihan-aplikasi-e-planning-sakato-plan-untuk-penyusunan-dokumen-perencanaan-tahun.html> pada 24 Februari 2021

Ginting, Robert Hendra.(2004) *Agam Menuju e-Government*. Portal Resmi Kabupaten Agam. Diakses dari <https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/3/agam-menuju-egov.html> pada 23 Februari 2021.



Ikhwan. (2017). Kabupaten Agam Rilis Aplikasi *e-Planning*, Kabar Sumbar, Diakses dari <https://www.kabarsumbar.com/berita/kabupaten-agam-rilis-aplikasi-e-planning/>. pada 19 Februari 2021

Kaba12.com. (2017). Untuk Transparansi Pembangunan Agam Implementasikan *e-Planning*, Kaba12, Diakses dari <https://kaba12.co.id/2017/11/06/untuk-transparansi-pembangunan-agam-implementasikan-e-planning/> pada 24 Februari 2021

MC Kab Agam. (2019). Raih *e-Government Award*, Bupati Agam: Pelayanan Masyarakat harus Lebih Baik, Portal Berita Info Publik, diakses dari <http://infopublik.id/kategori/nusantara/384271/raih-e-government-award-bupati-agam-pelayanan-masyarakat-harus-lebih-baik> jam 1.21 pada 1 Januari 2021.

Media Terobos. (2017). Bappeda dan Dinas Kominfo Agam Gelar Sosialisasi *e-Planning* untuk DPRD Agam. Diakses dari <http://www.mediaterobos.com/2018/01/bappeda-dan-dinas-kominfo-agam-gelar.htm> pada 6 Januari 2021.

Nurhayati. (2020). Kabupaten Kota terbaik Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020 Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Website Bappeda Sumatera Barat, diakses dari <https://bappeda.sumbarprov.go.id/home/news/139-kabupaten-kota-terbaik-penghargaan-pembangunan-daerah-ppd-tahun-2020-tingkat-provinsi-sumatera-barat.html> pada 13 Februari 2021.

ZP NHO. (2017) (Wakil Bupati Agam Launching Aplikasi *e-Planning*, *News Hanter Online*, Diakses dari <https://www.newshanter.com/?s=agam+launching+aplikasi+e-planning>, pada 19 Februari 2021



DOKUMEN

Berita Acara Hasil Musrenbang Kabupaten Agam Tahun 2019 (Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2020)

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Tahun 2018

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah.



Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Peraturan Bupati Agam Nomor 69 Tahun 2019 tentang Rencana Induk *e-Government* Kabupaten Agam Tahun 2019-2023.

Peraturan Bupati Agam Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Tahunan Daerah Berbasis Elektronik.

Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2020.

Peraturan Bupati Agam Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Peraturan Bupati Agam Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati Agam Nomor 66 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana Strategis Perubahan Tahun 2016-2021 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Agam.

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Agam Tahun 2016-2020

Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Agam Tahun 2016-2020



LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

“Pelaksanaan *e-Planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Agam Tahun 2020

Pedoman wawancara ini merupakan panduan yang akan peneliti gunakan untuk mendapatkan informasi dari para informan yang dijadikan narasumber. Pedoman wawancara yang peneliti gunakan ini tidak diikat oleh hal apapun, dan bersifat bebas dalam menggali data dan informasi yang dibutuhkan. Secara garis besar, berikut pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

I. Pedoman Wawancara untuk Informan Penelitian

A. *Public Value*

1. *Legitimacy dan Support*

- a. Apa saja kebijakan yang mendorong untuk pelaksanaan dan penunjang *e-planning*?
- b. Apa saja bentuk kegiatan lainnya dari *e-planning* yang tertuang dalam rencana kerja secara khusus untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah?
- c. Bagaimana bentuk sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan *e-planning*?
- d. Berapa kali sosialisasi dan pelatihan diadakan?
- e. Siapa saja yang terlibat dalam sosialisasi dan pelatihan *e-planning*?

2. *Organizational Capacity*

- a. Dari manakah sumber pendanaan untuk pelaksanaan *e-planning*?



- b. Bagaimanakan bentuk peanggaran dan pengalokasian dana dalam pelaksanaan *e-plannig* dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah?
- c. Bagaimanakah ketersediaan infrastukrut teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan *e-planning*?
- d. Apa saja kendala dan problem dalam bidang teknologi informasi dan penginputan server yang dialami?
- e. Siapa saja sumber daya dalam pelaksanaan *e-planning*?
- f. Bagaimana peran dari tiap sumber daya pelaksanaan *e-planning*?
- g. Terkait kemampuan, apakah sudah semua sumber daya berada pada bidangnya?
- h. Bagaiman bentuk kendala dalam bidang sumber daya manusia?
- i. Bagaimana bentuk peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang dilakukan oleh Bappeda maupun Pemkab?

B. Service Quality

1. Kualitas Informasi yang Diberikan

- a. Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan *e-planning*, diukur salah satunya melalui informasi yang diberikan terhadap pelaksanaan *e-planning*. Bagaimana dan apa saja bentuk informasi yang diberikan dalam menunjang pelaksanaan *e-planning*?
- b. Apa saja media yang digunakan dalam memberikan informasi terkait pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah?

2. Kecepatan Menanggapi Pengguna

- a. Bagaimana bentuk keaktifan/respon Bappeda dalam menanggapi dan merespon setiap keluhan/masalah terkait pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah?
- b. Apakah setiap laporan masalah yang diberikan langsung ditanggapi/ditindaklanjuti atau harus menunggu evaluasi kerja terlebih dahulu?

3. Ketersediaan Nomor Telepon atau faksimili

- a. Apakah ada kontak telepon yang diberikan sebagai bentuk cepat tanggap Bappeda?
- b. Apakah kontak tersebut dapat dihubungi dalam waktu tertentu saja? Atau memang 24 jam dapat melayani?
- c. Bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan bagi nomor telepon yang dicantumkan?
- d. Apakah ada rules atau dalam memberikan pelayanan pada nomor telepon tersebut?

C. Product Quality

1. Usability

- a. Bagaimana bentuk kemudahan dalam mengoperasikan web *e-planning* oleh pengguna?
- b. Bagaimana bentuk kemudahan yang nantinya akan dimengerti oleh publik dalam mengakses *e-planning*?
- c. Kemudahan dalam bernavigasi berupa fitur/menut toolbar yang diberikan?
- d. Apakah tampilan yang disajikan sudah memenuhi standar dari kemendagri?



- e. Apa saja standar yang diberikan oleh kemendagri terhadap aplikasi *e-planning*?

2. Informan Quality

- a. Apakah informasi yang diberikan pada aplikasi *e-planning* sudah relevan terhadap apa yang ada dalam perencanaan pembangunan daerah?
- b. Bagaimana bentuk *up todate* data yang diberikan oleh *e-planning*?
- c. Apakah informasi yang diberikan terpercaya untuk keabsahannya?
- d. Bagaimana bentuk kedetailan informasi yang diberikan?
- e. Bagaimana bentuk bahasa dan tampilan yang diberikan?

D. Value perception Transparency

- a. Bagaimana bentuk proses keterbukaan selama proses perencanaan pembangunan daerah? atau selama proses musrenbang?
- b. Apakah masyarakat dapat mengakses *e-planning* dengan mudah?
- c. Apakah terdapat rule/aturan untuk mengakses nya?
- d. Dalam memberikan pelayanan, bagaimana bentuk transparansi yang diberikan terhadap pengguna?
- e. Apakah hasil yang diberikan sesuai dengan hasil musrenbang?

E. Citizen Trust

1. Trust in Government

- a. Dari tujuan *e-planning* sendiri, apakah sudah tercapai/terlaksanakan sepenuhnya untuk perencanaan pembangunan daerah?
- b. Apa saja dampak yang diberikan dari pelaksanaan *e-planning* terkhususnya terhadap kepercayaan masyarakat?

- c. Apa saja dampak yang cukup signifikan yang diberikan *e-planning* terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah?

2. Trust in Technology

- a. Apakah data yang disimpan pada *e-planning* dapat dipercaya sepenuhnya?
- b. Dengan pelayanan yang diberikan apakah terdapat dampak yang diberikan?
- c. Apakah dapat mempercayai lembaga-lembaga yang terlibat dengan perencanaan pembangunan sepenuhnya?

F. Public Participation Policy Planning process

1. Partisipasi Aktif

- a. Bagaimana bentuk masyarakat/perwakilan musrenbang yang hadir dalam mengumpulkan informasi terkait perencanaan pembangunan dalam musrenbang?
- b. Bagaimana proses yang terjadi dalam pengumpulan informasi tersebut?
- c. Apakah ada aturan yang mendasari dari nagari dalam memberikan informasi?



2. Partisipasi dalam Memberikan Alternatif

- a. Bagaimana bentuk keaktifan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan daerah atau dalam musrenbang?
- b. Apakah ada bukti tertulis dari setiap keaktifan tersebut?
- c. Apakah nanti terdapat evaluasi di setiap pemberian alternatif-alternatif dari proses perencanaan pembangunan?